

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Pasolong. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Persada, U. &. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.

Polangi, K. (2014). Peran Administrasi Publik. Hal.15.

R&D, S. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sinambela, L. P. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. *Sugiyono dan R & D*, Hal. 194.

Thahier, M. &. (2016). Definisi Implementasi Kebijakan Publik. hal.36.

Jurnal

Insani, Istyadi. 2006. Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal STIA LAN Jakarta

Kuswara dan Kusmana, sistem informasi secara umum (Bekasi, Indonesia Journal on Networking and Security 2017)

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019
Tentang “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan
Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan.

Website

<https://www.depok.go.id/sejarah>

<https://bappeda.depok.go.id/profil.html>



Lampiran I : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

INDIKATOR	SUB INDIKATOR	INSTANSI	PEDOMAN WAWANCARA
George Edward III	Komunikasi	Sekretaris Kepala Dinas DISDUKCAPIL	
	Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran Kebijakan yang harus disebarkan kepada masyarakat sehingga akan mengurangi penyimpangan implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh masyarakat, maka akan terjadi penentangan dari masyarakat.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara Dinas Kependudukan Kota Depok dalam melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan SIAK kepada masyarakat? 2. Apakah saat ini informasi mengenai SIAK sudah diterima dengan baik oleh masyarakat? 3. Apakah terdapat hambatan dalam proses sosialisasi? Jika ada, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?
		Kepala bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara Dinas Kependudukan Kota Depok dalam melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan SIAK kepada masyarakat? 2. Apakah saat ini informasi mengenai SIAK sudah diterima dengan baik oleh masyarakat?

			<p>3. Apakah terdapat hambatan dalam proses sosialisasi? Jika ada, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?</p>
		<p>Petugas Pelayanan</p>	<p>1. Bagaimana proses penyuluhan yang dilakukan petugas terhadap masyarakat?</p> <p>2. Kendala apa saja yang sering dialami selama sosialisasi kebijakan SIAK?</p> <p>3. Bagaimana arahan yang dilakukan oleh petugas dalam memberikan pelayanan terhadap pengimplementasian SIAK?</p>
		<p>Masyarakat</p>	<p>1. Apakah adanya sosialisasi yang diberikan oleh Disdukcapil terkait adanya kebijakan SIAK yang dimana dapat mempermudah dalam pengurusan data kependudukan?</p> <p>2. Apakah pelaksanaan/operator memberikan informasi dengan jelas jika dalam pengurusan data kependudukan masyarakat mengalami kendala?</p> <p>3. Apakah arahan yang diberikan oleh petugas dalam memberikan informasi mengenai SIAK sudah dapat dipahami dengan baik?</p>


	Sumber Daya	Sekretaris Kepala Dinas DISDUKCAPIL	
	<p>Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sumber daya manusia di kantor Dinas Kependudukan Kota Depok sudah cukup baik dalam mengimplementasikan SIAK, baik secara kualitas maupun kuantitas ? 2. Apakah sumber daya manusia di kantor Dinas Kependudukan Kota Depok sudah cukup baik dalam mengimplementasikan SIAK, baik secara kualitas maupun kuantitas ? 3. Apakah peralatan yang digunakan sudah memenuhi untuk menjalankan implementasi SIAK, baik secara kualitas maupun kuantitas ?
		<p>Kepala bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sumber daya manusia di kantor Dinas Kependudukan Kota Depok sudah cukup baik dalam mengimplementasikan SIAK, baik secara kualitas maupun kuantitas ? 2. Apakah sumber daya manusia di kantor Dinas Kependudukan Kota Depok sudah cukup baik dalam

			<p>mengimplementasikan SIAK, baik secara kualitas maupun kuantitas ?</p> <p>3. Apakah peralatan yang digunakan sudah memenuhi untuk menjalankan implementasi SIAK, baik secara kualitas maupun kuantitas ?</p>
		 <p>Petugas Pelayanan</p>	<p>1. Apakah sebelum merumuskan untuk melaksanakan kebijakan SIAK para pelaksana/operator mendapatkan pelayanan ataupun arahan dari atasan terkait kebijakan SIAK agar nantinya pada saat proses implementasi tidak ada kendala yang tidak diinginkan?</p> <p>2. Apakah fasilitas yang diberikan Disdukcapil sudah cukup memadai dalam proses berjalannya kebijakan tersebut?</p> <p>3. Apakah pelaksana/operator mengalami kesulitan pada saat proses implementasi kebijakan dalam mendata data kependudukan?</p>
		Masyarakat	<p>1. Apakah respon dari pelaksana/operator Disdukcapil sudah cepat dan tanggap dalam merespon keluhan masyarakat?</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah fasilitas yang disediakan oleh Disdukcapil sudah memadai dan mendukung berjalannya SIAK? 3. Apakah masyarakat sudah dapat mengurus dokumen kependudukan sendiri secara online?
	Disposisi	Sekretaris Kepala Dinas DISDUKCAPIL	
	<p>Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah tuntutan dalam perubahan zaman sehingga Disdukcapil Kota Depok menerapkan kebijakan SIAK ? 2. Apakah sikap petugas dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan (memberikan pelayanan secara cepat dan efektif) ? 3. Bagaimana respon Disdukcapil jika dalam proses sosialisasi terhadap masyarakat banyak yang mengeluh dengan prosesnya yang belum mengerti ?
		Kepala bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah tuntutan dalam perubahan zaman sehingga Disdukcapil Kota Depok menerapkan kebijakan SIAK ?

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah sikap petugas dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan (memberikan pelayanan secara cepat dan efektif) ? 3. Bagaimana respon Disdukcapil jika dalam proses sosialisasi terhadap masyarakat banyak yang mengeluh dengan prosesnya yang belum mengerti ?
	 <p style="text-align: center;">Petugas Pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langkah apa yang pelaksana/operator ambil jika masih banyak masyarakat yang belum mau untuk membuat berkas kependudukan ? Contoh yang ada dipelayanan publik Disdukcapil Kota Depok. 2. Bagaimana respon pelaksana/operator jika masih banyak masyarakat yang belum mau untuk membuat? 3. Apakah ada masyarakat yang sudah mendaftar untuk membuat dokumen kependudukan secara online tetapi diwebsite masih belum terdaftar? 4. Bagaimana yang dilakukan oleh pelaksana/operator jika ditemukan data

			<p>kependudukan yang double?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sikap petugas dalam melakukan implementasi SIAK pada saat memberikan pelayanan (sikap dengan baik, ramah, soapan) ? 2. Apakah kemampuan pelaksana/operator dalam menyampaikan tata cara dalam pengimplementasian SIAK sudah cukup baik? 3. Menurut anda lebih efektif pelayanan yang diberikan Disdukcapil secara online atay offline? Mengapa demikian?
		Masyarakat	
	Struktur Birokrasi	Sekretaris Kepala Dinas DISDUKCAPIL	
	Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP).		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dengan adanya kebijakan tersebut dapat mempermudah dalam mendata dan mengurus data kependudukan di Kota Depok? 2. Bagaimana hasil dari implementasi SIAK? 3. Bagaimana SOP yang ideal yang harus diterapkan oleh pihak Disdukcapil untuk mencapai tujuan dari implementasi SIAK?
		Kepala bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dengan adanya kebijakan tersebut dapat mempermudah dalam mendata dan mengurus

		dan Pemanfaatan Data	<p>data kependudukan di Kota Depok?</p> <p>2. Bagaimana hasil dari implementasi SIAK?</p> <p>3. Bagaimana SOP yang ideal yang harus diterapkan oleh pihak Disdukcapil untuk mencapai tujuan dari implementasi SIAK?</p>
	 <p>Petugas Pelayanan</p>		<p>1. Apakah dalam melakukan proses penginputan data para pelaksana/operator sudah sesuai dengan keahlian yang mereka tekuni?</p> <p>2. Seberapa pentingnya proses komunikasi antar bidang dalam menjalankan tugas dan fungsi, atau dalam menjalankan suatu kebijakan tertentu? Dan apa makna dari adanya proses komunikasi tersebut?</p>
		Masyarakat	<p>1. Apakah pelaksanaan implementasi SIAK sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga dapat mempermudah alur dalam membuat data kependudukan ?</p> <p>2. Bagaimana pengurusan administrasi pada Disdukcapil Kota Depok? Apakah anda pernah mengalami kesulitan terkait</p>

			<p>pengurusan administrasi ?</p> <p>3. Hambatan apa yang dialami anda selama pelayanan secara online maupun offline ?</p>
--	--	--	---



Lampiran II : Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Wawancara dengan Bapak Drs. Jaka Susanta, MH, selaku Sekretaris Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 29 Juli 2022.

1. Bagaimana cara Dinas Kependudukan Kota Depok dalam melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan SIAK kepada masyarakat ?

Jawabannya : Kita sosialisasi ada beberapa mekanisme secara langsung seperti dikecamatan, kelurahan dengan sasaran yang berbeda. Ada juga sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti sekarang kita lakukan rekaman-rekaman KTP diberbagai sekolah di Kota Depok sebagai contoh pengenalan tentang kepemilikan dokumen kependudukan atau identitas. Kita juga lakukan sosialisasi berupa zoom DDMM (Disdukcapil Depok Menyapa Masyarakat) namun ditahun sekarang sudah berkurang dibandingkan tahun sebelumnya 2 minggu sekali dilakukan ditahun sekarang dikarenakan kesibukan. Kemudian juga segala kegiatan kita melibatkan masyarakat seperti contoh program door to door kekeluarga yang mempunyai anak bayi belum mempunyai akte kita buat dan juga akte kematian yang keluarganya belum membuat kita datang tujuannya agar database kita diperbarui. Kita juga mempunyai layanan Gladis Tiktok tingkat kecamatan yang diselenggarakan diwaktu libur tujuannya untuk menyaring masyarakat yang belum mnegerti layanan online.

2. Apakah saat ini informasi mengenai SIAK sudah diterima dengan baik oleh masyarakat Kota Depok ?

Jawaban : Baik, masyarakat juga menerima dengan baik dengan sosialisasi yang kita lakukan.

3. Apakah terdapat hambatan dalam proses sosialisasi? Jika ada, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ?

Jawaban : Untuk hambatan tidak ada ya, karena masyarakat juga menerima dengan baik

4. Apakah sumber daya manusia di kantor Dinas Kependudukan Kota Depok sudah cukup baik dalam mengimplementasikan SIAK, baik secara kualitas maupun kuantitas ?

Jawaban : Dari jumlah sumber daya kita terpenuhi sesuai kebutuhan, namun dari segi kualitas kita menerima apa adanya karena ketika SIAK diperakukan kita minta pegawai dari BKPSDM yang diberikan bukan yang sesuai kualifikasi artinya memang ada yang bagus, sedang dan yang kurang. Kalau sekarang kita didukung non PNS sekitar 50 orang jadi kita terbantu oleh mereka untuk melakukan pelayanan online dan keberlangsungan kebijakan SIAK ini. Cukup dari sisi kuantitas, untuk sisi kualitas relatif.

5. Apakah terdapat adanya pelatihan untuk meningkatkan SDM ?

Jawaban : Sebelum pandemi kita rutin pelatihan tetapi setelah pandemi banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan covid. Kita dari 2020 hingga sekarang sudah tidak ada lagi pelatihan digantikan dengan

pertemuan-pertemuan antar bidang untuk pembekalan walaupun tidak secara formal.

6. Apakah peralatan yang digunakan sudah memenuhi untuk menjalankan implementasi SIAK, baik secara kualitas maupun kuantitas ?

Jawabam : Dari segi peralatan menurut saya cukup, namun dibandingkan dengan daerah lain jauh lebih baik. Bahwa kita di 2012 daerah lain mempunyai 1 atau 2 printer kita mempunyai 65 printer artinya APBD kita mendukung, alat perekaman KTP ada disemua kelurahan dibandingkan Bogor hanya ada dikecamatan.

7. Adakah tuntutan dalam perubahan zaman sehingga Disdukcapil Kota Depok menerapkan kebijakan SIAK ?

Jawaban : Berdasarkan undang-undang yang artinya intruksi dari pemerintah pusat dilakukan serentak, karena memang tuntutan zamannya seperti itu saat ini, sekarang saja sudah dimulai pengenalan KTP digital yang bisa diakses melalui aplikasinya (Identitas Kependudukan Kemendagri) dengan cara masyarakat mendownload aplikasi tersebut lalu menginput data jika sudah bisa langsung verifikasi ke Disdukcapil dan nantinya masyarakat hanya membawa hp saja untuk identitas.

8. Apakah sikap petugas dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan (memberikan pelayanan secara cepat dan efektif) ?

Jawaban : kalau cepat atau efektifnya sudah baik, cuma dalam penanganan terkadang ada saja kendala yang ditemukan. Kendala itu juga itu bukan dar

petugas melainkan dari pemohonnya, contohnya pindah datang tidak diproses melainkan surat pindah datangnya sudah kadaluarsa.

9. Bagaimana respon Disdukcapil jika dalam proses sosialisasi terhadap masyarakat banyak yang mengeluh dengan prosesnya yang belum mengerti ?

Jawaban : Ya tetap kita bantu, seperti yang belum mengerti pendaftaran online kita bantu diloket secara langsung.

10. Apakah dengan adanya kebijakan tersebut dapat mempermudah dalam mendata dan mengurus data kependudukan di daerah Depok ?

Jawaban : Memang SIAK itu sistem informasi dari data kependudukan, menurut undang-undang No 24 Tahun 2013 wajib digunakan untuk beberapa hal perencanaan pembangunan, penegakan hukum, dan pelaksanaan demokrasi. SIAK juga dapat mempermudah sensus penduduk untuk mencocokkan data kependudukan. Saya yakin dengan adanya SIAK ini kriminalitas berkurang karena semua berbasis NIK misalnya daftar rekening, telepon, dll menggunakan NIK yang artinya penipuan secara itu berkurang contohnya dulu masyarakat KTP bisa lebih dari satu itu mudah, namun sekarang tidak dengan adanya SIAK susah karena identitas tunggal satu orang satu identitas.

11. Bagaimana hasil dari implementasi Kebijakan SIAK ?

Jawaban : Seperti yang dikatakan sebelumnya dengan terwujudnya satu orang satu identitas sekarang ini terwujud.

12. Bagaimana SOP yang ideal yang harus diterapkan oleh pihak Disdukcapil untuk mencapai tujuan dari Implementasi SIAK ?

Jawaban : Kalau SOP seharusnya persyaratan harus terpenuhi karena apa yang kita kerjakan berdampak hukum, makanya ketika ada perubahan data harus ada datanya. Dan SOP jangka waktu penyelesaian di undang-undang 14 hari kita sudah kecilkan menjadi 4 hari itu semua urusan. Kalau SDM kita bertambah bisa kita kecilkan lagi penyelesaiannya.

Wawancara dengan Bapak Nural Elvriandy, S.Kom,M.Si selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 21 Juli 2022.

1. Bagaimana cara Dinas Kependudukan Kota Depok dalam melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan SIAK kepada masyarakat ?

Jawaban : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan SIAK kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan, kelurahan, sekolah-sekolah, dan juga dengan cara menyebarkan informasi melalui media informasi seperti leaflet, spanduk, dan juga media sosial.

2. Apakah saat ini informasi mengenai SIAK sudah diterima dengan baik oleh masyarakat Kota Depok ?

Jawaban : Sudah, itu semua dapat dibuktikan dengan lebih tertibnya administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Depok.

3. Apakah terdapat hambatan dalam proses sosialisasi? Jika ada, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ?

Jawaban : Tidak ada mas, sejauh ini masyarakat menerima dengan baik terhadap sosialisasi terkait SIAK

4. Apakah sumber daya manusia di kantor Dinas Kependudukan Kota Depok sudah cukup baik dalam mengimplementasikan SIAK, baik secara kualitas maupun kuantitas ?

Jawaban : Untuk SDM sudah cukup memadai baik secara kualitas maupun kuantitas

5. Apakah terdapat adanya pelatihan untuk meningkatkan SDM ?

Jawaban : Ada mas, kita ada setiap sebulan sekali untuk pelatihan kepada petugas di Disdukcapil

6. Apakah peralatan yang digunakan sudah memenuhi untuk menjalankan implementasi SIAK, baik secara kualitas maupun kuantitas ?

Jawaban : Sudah memenuhi mas

7. Adakah tuntutan dalam perubahan zaman sehingga Disdukcapil Kota Depok menerapkan kebijakan SIAK ?

Jawaban : Kebijakan tentang SIAK mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku

8. Apakah sikap petugas dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan (memberikan pelayanan secara cepat dan efektif) ?

Jawaban : Sudah, karena semua petugas pelayanan sudah mendapatkan bimbingan teknis tentang hal tersebut

9. Bagaimana respon Disdukcapil jika dalam proses sosialisasi terhadap masyarakat banyak yang mengeluh dengan prosesnya yang belum mengerti ?

Jawaban : Respon dari petugas dalam melakukan penjelasan dengan memberikan gambaran atau contoh kepada masyarakat yang belum mengerti/mengeluh dengan prosesnya yg belum dimengerti.

10. Apakah dengan adanya kebijakan tersebut dapat mempermudah dalam mendata dan mengurus data kependudukan di daerah Depok ?

Jawaban : Ya, dapat dilihat dari meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen administrasi di Kota Depok. Dapat dilihat juga masyarakat yang tadinya mengantri diloket sekarang sudah tidak begitu banyak karena beralih kesistem online.

11. Bagaimana hasil dari implementasi Kebijakan SIAK ?

Jawaban : Baik mas sejauh ini

12. Bagaimana SOP yang ideal yang harus diterapkan oleh pihak Disdukcapil untuk mencapai tujuan dari Implementasi SIAK ?

Jawaban : SOP yang sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Kemendagri.

Wawancara dengan Bapak Anton Kuswara selaku Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 3 Agustus 2022.

1. Bagaimana proses penyuluhan yang dilakukan petugas terhadap masyarakat?

Jawaban : Proses penyuluhan yang dilakukan sebelum pandemi itu offline datang langsung ke setiap kelurahan dan dimasa pandemi kita manfaatin untuk sosialisasi/penyuluhan seperti media sosial, whatsapp yang terhubung langsung ke Silondo.

2. Kendala apa saja yang sering dialami selama sosialisasi kebijakan SIAK?

Jawaban : Kendala yang sering ditemui masyarakat masih belum begitu mengerti siste online seperti dalam penginputan data/pengiriman data lewat online.

3. Bagaimana arahan yang dilakukan oleh petugas dalam memberikan pelayanan terhadap pengimplementasian SIAK?

Jawaban : Inikan implementasi SIAK untuk tenaga operator setiap ada pembaruan sistem, petugas selalu diberikan bimbingan teknis dan diadakan evaluasi setiap bulannya guna mengetahui kendalanya. Masalahnya dimana apa bisa ditangani dengan cepat atau perlu kordinasi dengan pusat. Jadi petugas dapat arahan melalui bimtek dan evaluasi setiap bulan.

4. Apakah sebelum merumuskan untuk melakukan kebijakan tersebut para pelaksana/operator mendapatkan pelayanan ataupun arahan dari atasan terkait kebijakan SIAK agar nantinnnya pada saat proses implementasi tidak ada kendala yang tidak diinginkan ?

Jawaban : Petugas selalu diberikan bimbingan teknis dan diadakan evaluasi setiap bulannya guna mengetahui kendalanya. Masalahnya dimana apa bisa ditangani dengan cepat atau perlu kordinasi dengan pusat. Jadi petugas dapat arahan melalui bimtek dan evaluasi setiap bulan.

5. Apakah fasilitas yang diberikan Disdukcapil sudah cukup memadai dalam proses berjalannya kebijakan tersebut ?

Jawaban : Yang namanya fasilitas kita diberikan full fasilitas itu saja selalu ada kurangnya, tetapi untuk sementara di Depok itu cukup memuaskan.

6. Apakah pelaksana/operator mengalami kesulitan pada saat proses implementasi kebijakan dalam mendata data kependudukan ?

Jawaban : Yang menjadi kesulitan operator dalam mendata kependudukan karena menggunakan jaringan internet itu suka eror atau jaringan lemot dan mengakibatkan penumpukan data yg akan diinput.

7. Langkah apa yang pelaksana/operator ambil jika masih banyak masyarakat yang belum mau untuk membuat berkas kependudukan ? Contoh yang ada dipelayanan publik Disdukcapil Kota Depok.

Jawaban : Langkah yang diambil karena SIAK ini program dari pusat diprioritaskan dari usia 0 – 18 tahun bahkan semua denda dihapuskan atau digratiskan untuk mempermudah masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan. Lalu dihimbau untuk mengakses melalui whatsapp karena semua masyarakat pasti menggunakan whatsapp untuk mengirimkan data data untuk dibuatkan dokumen kependudukannya.

8. Bagaimana respon pelaksana/operator jika masih banyak masyarakat yang belum mau untuk membuat berkas kependudukan ?

Jawaban : Respon operator seperti yang tadi saya katakan kita kasih tau tentang pengiriman data melalui whatsapp

9. Apakah ada masyarakat yang sudah mendaftar untuk membuat dokumen kependudukan secara online tetapi di website masih belum terdaftar?

Jawaban : Seperti itu mas yang masih banyak dijumpai, yang mengakibatkan belum terdaftarnya para pemohon. Masalahnya dia mendaftar dihari libur atau dia mendaftar berkali-kali dengan nmr yang berbeda, untuk mengurangi masalah seperti itu kita adakan pelayanan disetiap kecamatan untuk pengarahannya.

10. Bagaimana yang dilakukan oleh pelaksana/operator jika ditemukan data kependudukan yang double ?

Jawaban : Kita betulkan mas, dari kebanyakan data yang double itu hanya 1 atau 2 orang saja.

11. Apakah dalam melakukan proses pengimputan para operator/pelaksana sudah sesuai dengan jobdesk yang mereka tekuni ?

Jawaban : Untuk operator yang terutama dia paham soal komputer dan ada pembinaan. Ada juga pembatasan operator untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan pekerjaannya, jadi operator sudah sesuai keahliannya.

12. Seberapa pentingnya proses komunikasi antar bidang dalam menjalankan tugas dan fungsi, atau dalam menjalankan suatu kebijakan tertentu ? dan apa makna dari adanya proses komunikasi tersebut ?

Jawaban : Itu sangat penting mas, dianjurkan juga setiap bidang saling kordinasi karena dalam pengimputan data dijalankan oleh operator secara manual. Dan makna dari komunikasi antar bidang itu wajib.

Wawancara dengan Ibu Alvina Ramadhanty selaku Masyarakat tanggal 21 Juli 2022.

1. Apakah adanya sosialisasi yang diberikan oleh Disdukcapil terkait adanya kebijakan SIAK yang dimana dapat mempermudah dalam pengurusan data kependudukan ?

Jawaban : Ya ada, sangat membantu sekali agar mempermudah dalam pengurusan data – data kependudukan

2. Apakah pelaksanaan/operator memberikan informasi dengan jelas jika dalam pengurusan data kependudukan masyarakat mengalami kendala?

Jawaban : Ya ada, memberikan informasinya sangat jelas, namun operator untuk menjawab/membalas chat melalui online kurang cepat sehingga harus menunggu jawabannya terlebih dahulu

3. Apakah arahan yang diberikan oleh petugas dalam memberikan informasi mengenai SIAK sudah dapat dipahami dengan baik ?

Jawaban : Ya, sudah paham arahan yang diberikan oleh petugas di Disdukcapil

4. Apakah respon dari pelaksana/operator Disdukcapil sudah cepat dan tanggap dalam merespon keluhan masyarakat ?

Jawaban : Tidak, karena ketika kita bertanya ke operator melalui online tidak langsung dibales chatnya

5. Apakah fasilitas yang disediakan oleh Disdukcapil sudah memadai dan mendukung berjalannya SIAK?

Jawaban : Ya, sudah memadai fasilitas yang disediakan

6. Apakah masyarakat sudah dapat mengurus dokumen kependudukan sendiri secara online ?

Jawaban : Ya, sudah dapat mengurus dokumen kependudukan dengan sangat cepat prosesnya

7. Bagaimana sikap petugas dalam melakukan implementasi SIAK pada saat memberikan pelayanan (sikap dengan baik, ramah, sopan) ?

Jawaban : Sikap petugas cukup baik dalam pelayanannya

8. Apakah kemampuan pelaksana/operator dalam menyampaikan tata cara dalam pengimplementasian SIAK, sudah cukup baik ?

Jawaban : Cukup baik pelaksanaannya dan cara menyampaikannya

9. Menurut anda lebih efektif pelayanan yang diberikan Disdukcapil secara online dan offline ? mengapa demikian?

Jawaban : Menurut saya, pelayanan di Disdukcapil secara online lebih efektif karena disamping cepat dan tidak harus mengantri di loket

10. Apakah pelaksanaan implementasi SIAK sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga dapat mempermudah alur dalam membuat data kependudukan ?

Jawaban : Ya, pelaksanaannya sudah sesuai prosedur dalam membuat data kependudukan

11. Bagaimana pengurusan administrasi pada Disdukcapil Kota Depok?

Apakah anda pernah mengalami kesulitan terkait pengurusan administrasi ?

Jawaban : Baik, tidak kami belum pernah mengalami kesulitan

12. Hambatan apa yang dialami anda selama pelayanan secara online maupun offline ?

Jawaban : Hambatan yang dialami saat pelayanan secara online mengupload data karena kebanyakan ibu-ibu tidak mengerti seperti saya

Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku Masyarakat tanggal 21 Juli 2022.

1. Apakah adanya sosialisasi yang diberikan oleh Disdukcapil terkait adanya kebijakan SIAK yang dimana dapat mempermudah dalam pengurusan data kependudukan ?

Jawaban : Tidak tau saya adanya tindak sosialisasi yang dilakukan oleh disdukcapil dengan adanya kebijakan SIAK karena minimnya informasi.

2. Apakah pelaksanaan/operator memberikan informasi dengan jelas jika dalam pengurusan data kependudukan masyarakat mengalami kendala?

Jawaban : Menurut saya pelaksana atau operator yang memberikan informasi belum begitu terlalu jelas karena sangat belum jelas dalam memberikan informasi pengurusan data

3. Apakah arahan yang diberikan oleh petugas dalam memberikan informasi mengenai SIAK sudah dapat dipahami dengan baik ?

Jawaban : Menurut saya ya mudah dipahami tetapi belum begitu jelas arahan yang diberikan petugas mengenai informasi SIAK

4. Apakah respon dari pelaksana/operator Disdukcapil sudah cepat dan tanggap dalam merespon keluhan masyarakat ?

Jawaban : Respon pelaksanaan operator belum begitu cepat tanggap masih terlalu lama merespon masyarakat berupa keluhan keluhannya

5. Apakah fasilitas yang disediakan oleh Disdukcapil sudah memadai dan mendukung berjalannya SIAK?

Jawaban : Menurut saya fasilitas yang diberikan disdukcapil sudah memadai tetapi belum sangat mendukung dengan berjalannya SIAK

6. Apakah masyarakat sudah dapat mengurus dokumen kependudukan sendiri secara online ?

Jawaban : Masyarakat belumterlalu paham dan menngerti melakukan mengrus dokumen online termasuk saya karena sistem yang terkadang lama di akses.

7. Bagaimana sikap petugas dalam melakukan implementasi SIAK pada saat memberikan pelayanan (sikap dengan baik, ramah, sopan) ?

Jawaban : Menurut saya sikap petugas dalam melakukan impelmentasi SIAK dalam memberikan pelayanan cukup baik walaupun agak lama

8. Apakah kemampuan pelaksana/operator dalam menyampaikan tata cara dalam pengimplementasian SIAK, sudah cukup baik ?

Jawaban : Menurut saya operator dalam menyampaikan tata cara impelemntasi SIAK belum berjalan beigtu baik ya karena tadi sulit dipahami

9. Menurut anda lebih efektif pelayanan yang diberikan Disdukcapil secara online dan offline ? mengapa demikian?

Jawaban : Menurut saya pelayanan efektif yaitu secara offline, karena online akses kadang suka lama dan respond kurang

10. Apakah pelaksanaan implementasi SIAK sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga dapat mempermudah alur dalam membuat data kependudukan ?

Jawaban : Menurut saya sudah sesuai prosedur tetapi mempermudah belum

11. Bagaimana pengurusan administrasi pada Disdukcapil Kota Depok? Apakah anda pernah mengalami kesulitan terkait pengurusan administrasi ?

Jawaban : Menurut saya, yang saya alami pengurusan disdukcapil di kota Depok masih mengalami kesulitan pengrusannya apalagi di bidang administrasi

12. Hambatan apa yang dialami anda selama pelayanan secara online maupun offline ?

Jawaban : Hambatan yang saya alami secara offline yaitu adanya pengurusan yang lama hingga berjam jam, dan kalau online akses sistem yang begitu lama dan respond kurang

Wawancara dengan Ibu Anisa Derliani selaku Masyarakat tanggal 29 Juli 2022.

1. Apakah adanya sosialisasi yang diberikan oleh Disdukcapil terkait adanya kebijakan SIAK yang dimana dapat mempermudah dalam pengurusan data kependudukan ?

Jawaban : Tidak ada sosialisasi yang diberikan oleh disdukcapil terkait adanya kebijakan SIAK yang dapat mempermudah dalam pengurusan data kependudukan

2. Apakah pelaksanaan/operator memberikan informasi dengan jelas jika dalam pengurusan data kependudukan masyarakat mengalami kendala?

Jawaban : Sudah cukup jelas dalam memberikan informasi pengurusan data kependudukan masyarakat jika mengalami kendala

3. Apakah arahan yang diberikan oleh petugas dalam memberikan informasi mengenai SIAK sudah dapat dipahami dengan baik ?

Jawaban : Cukup jelas dalam memberikan informasi mengenai SIAK

4. Apakah respon dari pelaksana/operator Disdukcapil sudah cepat dan tanggap dalam merespon keluhan masyarakat ?

Jawaban : Cukup tanggap respon dalam merespon keluhan masyarakat

5. Apakah fasilitas yang disediakan oleh Disdukcapil sudah memadai dan mendukung berjalannya SIAK?

Jawaban : Kurang lebih memadai dan mendukung berjalannya SIAK

6. Apakah masyarakat sudah dapat mengurus dokumen kependudukan sendiri secara online ?

Jawaban : Sudah dapat mengurus dokumen secara online tetapi tidak semua masyarakat mempunyai handphone modern sehingga kesulitan untuk mengurus dokumen secara online

7. Bagaimana sikap petugas dalam melakukan implementasi SIAK pada saat memberikan pelayanan (sikap dengan baik, ramah, sopan) ?

Jawaban : Cukup ramah sikap petugas dalam melakukan implementasi SIAK tetapi ada saja yang bersikap judes kepada masyarakat

8. Apakah kemampuan pelaksana/operator dalam menyampaikan tata cara dalam pengimplementasian SIAK, sudah cukup baik ?

Jawaban : Pelaksana dalam menyampaikan tata cara pengimplementasian SIAK baik

9. Menurut anda lebih efektif pelayanan yang diberikan Disdukcapil secara online dan offline ? mengapa demikian?

Jawaban : Menurut saya lebih efektif pelayanan secara offline karena semua masyarakat bisa bertanya langsung jika kurang jelas kepada petugas

10. Apakah pelaksanaan implementasi SIAK sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga dapat mempermudah alur dalam membuat data kependudukan ?

Jawaban : Pelaksana implementasi SIAK sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku

11. Bagaimana pengurusan administrasi pada Disdukcapil Kota Depok?

Apakah anda pernah mengalami kesulitan terkait pengurusan administrasi ?

Jawaban : Sudah cukup baik pengurusan administrasi pada disdukcapil kota depok

12. Hambatan apa yang dialami anda selama pelayanan secara online maupun offline ?

Jawaban : Banyak masyarakat yang belum mengerti cara mengurus kependudukan sendiri secara online dikarenakan antara lain tidak mempunyai handphone yang modern.

Lampiran III : Dokumentasi

Dokumentasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

1. Dokumentasi wawancara Sekretaris Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Bapak Drs. Jaka Susanta, MH.




2. Dokumentasi wawancara kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Bapak Bapak Nural Elvriandy, S.Kom,M.Si.



3. Dokumentasi wawancara Petugas/Operator pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Bapak Anton Kuswara



Lampiran IV : Surat Penelitian

 UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax: 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Nomor : 662/WD/ VII /2022 Jakarta, 22 juli 2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data


Kepada Yth : Bapak/Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok
Dengan hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Fadhilah
Nomor Induk Mahasiswa : 183112351550026
Prodi/Konsentrasi : Administrasi Publik
Alamat Rumah : Jl.Paraji No.57 Rt.04/05 Kec.cilodong Kel.Kalibaru Kota Depok
HP : 0895337571515

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian Di Kantor Satuan polisi pamong praja Kabupaten Bogor dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul : **Implementasi Sistem Informasi Bidang Kependudukan (SIAK) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021** Dengan Dosen Pembimbing: Drs. Suranto,M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya. Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.


Dr. Ghok Nur Avianto, M.Si

UNIVERSITAS NASIONAL

Program Studi : Ilmu Politik - Hubungan Internasional - Sosiologi - Administrasi Publik- Ilmu Komunikasi



PEMERINTAH KOTA DEPOK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka I Lantai IV,
Jl. Margonda Raya No. 54 Telepon : 021-2941 2287
Faximile : 021-2941 2287 Website : Kesbangpol.depok.go.id Email : badankesbangpol.depok@gmail.com
Kota Depok, Jawa Barat - 16431

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/860 - Bakesbangpol

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
3. Peraturan Walikota Depok Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Ijin Penelitian/Riset/Pendidikan Sistem Ganda di Kota Depok.
4. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- b. Menimbang : Memperhatikan Surat dari Universitas Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nomor : 625/WD/VI/2022
Tanggal : 23 Juni 2022
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- a. Nama / NIM : Muhammad Fikri Fadhilah / 183112351550026
b. Alamat : Jl. Paraji No. 57 RT. 04 RW. 05 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong Kota Depok
Nomor Telepon : 0895337571515
c. Judul Penelitian : 1) "Implementasi Sistem Informasi Administrasi Bidang Kenendudukan (SIAK) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021".
2) Lokasi Penelitian : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok
3) Waktu/Lama Penelitian : 28 Juni 2022 s/d 28 Juli 2022
4) Anggota Tim Peneliti : -
5) Bidang Penelitian : Administrasi Publik
6) Status Penelitian : Baru

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Depok, 28 Juni 2022

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Catatan :

1. Wajib Melaporkan Hasil Riset/ Penelitian/ Survei/ PKL Ke Badan KESRANGPOL dan Dinas/ Instansi Tempat Melakukan Riset/ Penelitian/ Survei/ PKL;
2. Harus Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Fikri Fadhilah

Tempat, tanggal Lahir : Depok, 11 April 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Nomor Telepon : 0895337571515

Alamat : Jl. Paraji Rt.04/05 No.57 Kel. Kalibaru Kec.
Cilodong Kota Depok

Email : fikrifadhilah14@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN CIKUMPA : 2006 - 2012
2. SMP NEGRI 16 DEPOK : 2012 - 2015
3. SMK YAPEMRI DEPOK : 2015 - 2018
4. UNIVERSITAS NASIONAL : 2018 - 2022



Muhammad Fikri Fadhilah

ORIGINALITY REPORT


24%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

13%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
2	disdukcapil.depok.go.id Internet Source	2%
3	depokkota.bps.go.id Internet Source	1%
4	repository.uma.ac.id Internet Source	1%
5	moslemwiki.com Internet Source	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	123dok.com Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
9	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
